

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kajian ilmu sosial seperti antropologi, kebijakan publik tidak hanya sekedar dipandang dan dilihat sebagai instrumen kaku untuk mengatasi permasalahan sosial saja, melainkan juga harus dilihat dari sudut pandang sebagai praktik sosial yang memiliki dimensi dalam aspek simbolik dan politik. Kebijakan negara sendiri dapat berfungsi sebagai sarana untuk membangun legitimasi kekuasaan, membentuk citra negara, serta menghasilkan pengakuan sosial dari masyarakat terhadap otoritas pemerintah (Sumitro, 2024). Hal ini juga sejalan dengan perspektif politik bahwa negara tidak hanya mendistribusikan sumber daya material, tetapi juga memproduksi makna sosial yang membentuk cara masyarakat memahami peran negara dalam kehidupan mereka (Shore & Wright, 1997). Dalam perspektif ilmu sosial juga, kekuasaan tidak selalu bekerja melalui paksaan atau kekuatan ekonomi semata, tetapi juga melalui apa yang disebut sebagai modal simbolik, yaitu bentuk kekuasaan yang muncul dari pengakuan, legitimasi, dan kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap suatu otoritas. Dalam konteks negara modern, kebijakan publik dapat memperlihatkan kehadiran negara sekaligus membangun persepsi mengenai kepedulian dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat, yang biasanya eksistensi kepedulian ini diwujudkan dan dihadirkan dalam bentuk kebijakan publik (Syamsu, 2025).

Salah satu bentuk kebijakan yang sering digunakan oleh negara untuk membangun legitimasi dan pengakuan sosial biasanya hadir dalam bentuk program yang dekat dengan masyarakat, dan program kesejahteraan sosial merupakan salah satu pilihan pemerintah untuk mewujudkan hal ini. Program kesejahteraan sosial sendiri merupakan program yang menysasar kelompok masyarakat tertentu, dan bagian dari kebijakan publik yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial yang dihasilkan dari proses politik dan tata kelola pemerintahan (Suryono, 2014). Program kesejahteraan seperti bantuan pangan, subsidi sosial, maupun intervensi kesehatan tentu saja tidak hanya bekerja sebagai mekanisme distribusi sumber daya saja, tetapi juga dapat memperkuat

hubungan antara negara dan masyarakat penerima kebijakan. Sebagaimana yang dapat dilihat di beberapa studi dalam antropologi kebijakan, program kesejahteraan negara sering kali menghasilkan persepsi tentang negara sebagai aktor yang hadir dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat (Shore & Wright, 1997; Ferguson, 2013). Ini menandakan program kesejahteraan sosial biasanya hadir dan eksis sebagai solusi dari masalah yang sudah hadir sebelumnya di tengah masyarakat, menjadi harapan dan pijakan, serta diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada di tengah masyarakat tersebut.

Gizi dan ketahanan pangan anak merupakan salah satu topik permasalahan yang sudah cukup lama eksis dan bertahan di tengah ruang diskusi informal masyarakat. Persoalan gizi dan ketahanan pangan anak, di satu sisi, juga diperhatikan secara serius dalam konteks formal, yang mana isu ini merupakan salah satu isu global yang menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan manusia berkelanjutan. Laporan *The State of Food Security and Nutrition in the World* (FAO, 2023) mencatat bahwa sekitar 149 juta anak di bawah usia lima tahun di dunia masih mengalami stunting akibat kekurangan gizi kronis. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga mengganggu perkembangan kognitif, prestasi pendidikan, dan produktivitas ekonomi di masa depan. Dalam konteks inilah, program *school feeding* atau pemberian makanan bergizi gratis di sekolah telah diadopsi secara luas oleh berbagai negara berkembang sebagai strategi dan solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pada isu kekurangan gizi anak (Indriasari et al., 2021).

Program *school feeding*, di sisi lain, memang sudah terbukti memberikan dampak multidimensional, tidak hanya terhadap kesehatan dan pendidikan, tetapi juga terhadap hubungan sosial antara negara dan warganya. Penelitian Dreze dan Goyal (2003) di India, misalnya, menunjukkan bahwa program makan siang gratis, selain meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, program ini juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Secara sosial, tindakan memberi makan anak-anak memang dapat menjadi simbol moral bahwa negara hadir dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan generasi muda. Hal ini juga terlihat dalam laporan *World Food Programme* (2022) yang menegaskan bahwa keberhasilan program makanan sekolah di negara berkembang sering kali

ditentukan oleh dimensi sosial dan simbolik, bukan semata-mata oleh efektivitas teknis. Yang membuktikan secara tidak langsung, program semacam ini dapat secara efektif mengambil satu Langkah lebih dekat dengan masyarakat.

Indonesia sendiri juga menghadapi tantangan besar dalam hal status gizi anak. Berdasarkan Laporan Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, prevalensi stunting nasional berada di angka 19,8%, menurun dari 21,6% pada tahun sebelumnya (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Meskipun menunjukkan tren positif, angka tersebut masih jauh dari target *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu 14% pada tahun 2024. Dalam rangka akselerasi penurunan angka stunting dan memperbaiki status gizi anak, pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, memperkenalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program unggulan nasional pada tahun 2025. Program ini dirancang untuk memberikan satu porsi makanan bergizi setiap hari bagi siswa sekolah dasar dan ibu hamil, dengan harapan dapat memperkuat fondasi gizi dan pendidikan anak Indonesia dan memperlihatkan, bahwasanya pemerintah sedang mencoba untuk mengatasi dan mencari solusi masalah ataupun isu yang sedang eksis di tengah masyarakat itu tadi.

Implementasi kebijakan berskala nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tentu tidak beroperasi begitu saja secara hampa tanpa ada hambatan, melainkan bergesekan langsung dengan realitas sosial-ekonomi di tingkat daerah. Di Kota Semarang, program ini didukung oleh infrastruktur operasional yang masif, di mana terdapat sekitar 60 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi melayani program MBG, dengan tugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi untuk mendukung kesehatan masyarakat (Dinas Ketahanan Pangan, 2026). Namun, implementasi di ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,73 persen pada tahun 2022 ini dihadapkan pada lanskap masyarakat urban yang sangat kompleks dan dinamis (BPS Kota Semarang, 2023). Kompleksitas ini semakin menguat ketika intervensi program tersebut diturunkan ke wilayah yang lebih spesifik seperti Kecamatan Tembalang. Sebagai kawasan yang mengalami transformasi urbanisasi pesat berkat kehadiran institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Diponegoro, Tembalang dihuni oleh populasi yang sangat beragam, di mana kelompok kelas pekerja

informal hidup berdampingan dengan masyarakat kelas menengah yang mapan secara ekonomi (BPS Kota Semarang, 2023; Prasetyo, 2012). Di wilayah dengan demografi yang saling bersilangan inilah, sebuah kebijakan bantuan sosial yang dipukul rata niscaya akan memunculkan respons dan pemaknaan yang tidak seragam di tengah masyarakatnya.

Sebagai salah satu titik implementasi di kawasan tersebut, SD Negeri Tembalang menjadi representasi nyata dari bertemunya kebijakan negara dengan ranah domestik keluarga. Sekolah ini mendidik siswa dari latar belakang yang heterogen dan cenderung beragam. Sebagian kecil berasal dari keluarga rentan secara ekonomi, sementara sebagian besar lainnya merupakan anak-anak dari keluarga kelas menengah yang sesungguhnya telah memiliki otonomi, privilese, serta literasi gizi yang memadai di rumah. Dalam konteks inilah, posisi wali murid menjadi aktor sentral yang sangat krusial. Bagi para wali murid di SDN Tembalang, kehadiran seporsi makanan MBG di meja belajar anak mereka tidak lagi sekadar dilihat sebagai bantuan pengentasan kelaparan, melainkan memicu proses negosiasi preferensi, kebiasaan dan penilaian langsung terhadap kapabilitas negara. Pengalaman sehari-hari mereka dalam memantau kualitas makanan, standar kebersihan, dan kesesuaian menu dengan kondisi anak yang secara otomatis membentuk persepsi baru mengenai sejauh mana negara benar-benar "hadir".

Meskipun program penyediaan makanan di sekolah memiliki dampak multidimensional, sebagian besar kajian terdahulu masih cenderung terjebak pada pendekatan kesehatan masyarakat yang hanya mengukur efektivitas teknis dan indikator gizi semata (Bundy et al., 2009). Sementara itu, kajian yang membedah program tersebut dari perspektif antropologi, khususnya terkait bagaimana masyarakat urban kelas menengah memaknai kebijakan tersebut secara sosial dan kultural, masih sangat terbatas. Padahal, cara wali murid mengelola kekecewaan teknis di lapangan, bersolidaritas lintas kelas, dan pada akhirnya mengartikan niat baik pemerintah merupakan esensi dari bekerjanya kekuasaan di ranah sosial. Berangkat dari urgensi dan kekosongan literatur tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana wali murid di SDN Tembalang memaknai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan negara. Dengan menggunakan kacamata teori modal simbolik dari Pierre Bourdieu, penelitian ini

bertujuan untuk menyingkap bagaimana sebuah intervensi sosial tidak hanya mendistribusikan sumber daya, tetapi juga beroperasi sebagai praktik produksi modal simbolik yang membentuk dan mempertahankan legitimasi negara di mata

1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan sosial merupakan contoh kebijakan yang bersentuhan dan berinteraksi langsung di tengah masyarakat, dan menjadi contoh program yang dihadirkan oleh pemerintah dan memiliki dampak yang besar masyarakat. Tentunya dengan adanya eksistensi kebijakan tersebut, selain memberikan bantuan secara langsung, kebijakan itu sendiri juga dapat membentuk perspektif baru masyarakat ketika memandang peran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan antropologi politik, program bantuan sosial dilihat sebagai salah satu cara pemerintah memperoleh dukungan dan pengakuan dari masyarakat. Pemerintah dianggap menggunakan program ini untuk membagikan sumber daya dan memperlihatkan bahwa mereka peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan cara ini, kebijakan bantuan sosial membantu pemerintah memperkuat posisinya dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan contoh dari kebijakan publik yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki anak yang sedang berada pada jenjang pendidikan. Program tersebut tidak hanya memberikan manfaat berupa pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak, tetapi juga membentuk pengalaman sosial baru bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan kebijakan negara. Melalui pengalaman tersebut, masyarakat mampu membentuk berbagai makna terkait program yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini, orang tua sebagai individu yang memiliki koneksi langsung dengan anak-anak penerima program menjadi aktor sosial yang krusial dalam memahami bagaimana kebijakan tersebut dipahami di kalangan masyarakat. Pemahaman dan sudut pandang orang tua terhadap program bergizi gratis tidak hanya semata-mata berkaitan dengan manfaat nyata yang diterima anak, melainkan juga mencerminkan bagaimana mereka melihat fungsi pemerintah dalam menyediakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kerangka teori modal simbolik, Pierre Bourdieu menjabarkan bagaimana kekuasaan simbolik muncul ketika suatu tindakan atau praktik

mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari masyarakat. Untuk kebijakan publik sendiri, program kesejahteraan yang dijalankan oleh pemerintah dapat berfungsi sebagai alat produksi masif modal simbolik jika masyarakat menilai kebijakan tersebut secara positif sebagai tanda perhatian negara terhadap kesejahteraan mereka.

Namun, tentunya proses produksi modal simbolik ini tidak berjalan dengan sendirinya. Pandangan masyarakat mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat bervariasi, dipengaruhi oleh pengalaman sosial, kondisi ekonomi, dan keterlibatan mereka dengan program yang ada. Untuk itu, sangat krusial untuk memahami cara masyarakat, sebagai pihak yang mendapatkan kebijakan, melihat dan memaknai program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana intervensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kehidupan sehari-hari wali murid SDN Tembalang?
2. Bagaimana wali murid memaknai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan bagaimana makna tersebut membentuk, menegosiasikan, atau bahkan membentuk citra negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini ditujukan untuk menggali dan mengkaji bagaimana masyarakat yang menerima kebijakan memahami kebijakan itu sendiri. Secara khusus, fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis perspektif orang tua siswa terhadap intervensi program makan bergizi gratis sebagai salah satu bentuk kebijakan sosial yang diterapkan oleh pemerintah. Lebih rinci, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pemaknaan wali murid terhadap program tersebut dapat berkaitan dengan proses produksi modal simbolik negara sebagaimana dijelaskan dalam teori Pierre Bourdieu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bisa berkontribusi pada perkembangan kajian ilmu sosial, khususnya di bidang dan antropologi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Penelitian ini berpotensi untuk memperdalam pemahaman tentang interaksi antara kebijakan pemerintah dan masyarakat dengan menggunakan sudut pandang modal simbolik yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu. Di samping itu, studi ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangsih bagi kajian yang menekankan bahwa kebijakan sosial tidak hanya dilihat sebagai alat untuk distribusi kesejahteraan, tetapi juga sebagai praktik simbolik yang dapat membantu membangun legitimasi negara di mata warga. Oleh karena itu, penelitian ini berpeluang untuk memperluas wawasan mengenai bagaimana masyarakat memahami kebijakan negara dalam konteks kehidupan sosial mereka sehari-hari.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi bahan renungan bagi para pengambil kebijakan, terutama dalam merancang program sosial yang berbasis kesejahteraan. Pemahaman tentang dinamika simbolis dan nilai-nilai moral yang terkait dengan program seperti MBG bisa membantu pemerintah dalam menyusun strategi komunikasi publik yang lebih etis, partisipatif, dan berkesinambungan. Di samping itu, temuan dari penelitian ini berpotensi berkontribusi bagi dunia pendidikan dan masyarakat luas untuk lebih memahami bahwa kebijakan publik tidak hanya berpengaruh terhadap aspek-aspek materi (gizi, ekonomi, pendidikan), tetapi juga membentuk kesadaran sosial, rasa kepemilikan, serta bahkan orientasi politik masyarakat terhadap negara dan para pemimpinnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Tabel 1. Tinjauan Pustaka

No	Judul	Penulis	Teori	Metode	Kesimpulan
1	Rethinking School Feeding: Social Safety Nets, Child Development and the Education Sector	Donald Bundy et al.	Human capital & social protection	Studi kebijakan an global	Program makan sekolah tidak hanya meningkatkan nutrisi, tetapi juga memperkuat partisipasi pendidikan dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin.
2	Home-Grown School Feeding and Community Development	FAO & WFP	Social policy & development	Analisis kebijakan an komparatif	Program makan sekolah dapat memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat melalui intervensi kesejahteraan.
3	Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis	Agustini & Mulyani	Komunikasi publik & komuni	Kualitatif deskriptif	MBG meningkatkan gizi, pendidikan, dan ekonomi lokal, namun

			kasi imperso nal		menghadapi masalah distribusi, standar gizi, dan koordinasi kebijakan.
4	Analisis Komunikasi Impersonal Pemerintah dalam Membangun Dukungan Publik	Idewi Usman & Andi Katili	Perseps i sosial & partisip asi masyar akat	Kuantit atif (cross- section al)	Komunikasi impersonal melalui media meningkatkan pengetahuan dan persepsi publik, tetapi belum merata dalam menjangkau seluruh masyarakat.
5	Persepsi Orangtua Terhadap Program Makanan Bergizi Gratis	Minarsih et al.	Human security	Kuantit atif (cross- section al)	Orang tua memiliki persepsi positif (86,4%), namun dampak kesehatan belum signifikan dan masih ada perilaku konsumsi tidak sehat.

6	Diplomasi Keamanan Manusia Pemerintah Indonesia dalam Program MBG	Amellia Azzahra	Human security	Studi kualitatif (skripsi)	Program MBG diposisikan sebagai bagian dari keamanan manusia melalui kerja sama internasional dan kebijakan lintas negara.
---	---	--------------------	-------------------	----------------------------------	--

Beragam studi telah berupaya membahas program makan di sekolah sebagai salah satu instrumen kebijakan sosial yang diandalkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan keluarga. Secara umum, kajian tentang program makan sekolah dikaitkan dengan perlindungan sosial serta pengembangan manusia. Riset yang dilakukan oleh Donald Bundy dan timnya (2009) menunjukkan bahwa program ini memiliki fungsi penting sebagai jaring pengaman sosial yang dapat meningkatkan keikutsertaan dalam pendidikan, mendukung kesehatan anak, dan memberikan bantuan sumber daya kepada keluarga yang kurang mampu. Program ini bukan hanya sebagai upaya intervensi gizi, tetapi juga berperan sebagai kebijakan sosial yang dapat mengatasi situasi krisis dan melindungi kelompok yang rentan.

Jika membahas konteks kebijakan global, pasti menyinggung tentang penyediaan makan sekolah yang mana berasal dari sumber local, yang pada akhirnya memperluas struktur fungsi program makan di sekolah dengan mengaitkannya pada sektor pertanian dan ekonomi setempat. Program ini tidak hanya menguntungkan siswa, tetapi juga memperkuat sistem pangan lokal, meningkatkan pendapatan para petani kecil, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan (FAO & WFP, 2018). Oleh karena itu, program makan sekolah dimaknai sebagai kebijakan yang menghubungkan berbagai sektor, mengintegrasikan banyak elemen seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan pengembangan ekonomi lokal.

Dalam konteks Indonesia, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul sebagai salah satu bentuk implementasi kebijakan yang megarah untuk mengatasi masalah gizi pada anak serta meningkatkan mutu sumber daya manusia yang sudah lama menjadi dilema di Indonesia. Alhasil, dengan arah dan tujuan tersebut, MBG banyak memiliki respon yang positif di kalangan masyarakat, khususnya dari orang tua wali murid yang terdampak. program MBG sendiri memperoleh tingkat penerimaan yang besar, mencapai 86,4%, serta berhasil mendorong perilaku konsumsi yang sehat pada anak, seperti kebiasaan mengonsumsi sayur dan buah (Minarsih et al., 2025). Program ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi nasional untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak.

Dalam hal ini, kita dapat menemukan hal yang menarik, bagaimana sebagian besar penelitian tersebut tetap memberikan perhatian lebih pada dampak langsung program, terutama yang berhubungan dengan gizi, kesehatan, dan hasil belajar peserta didik. Penekanan pada sisi teknis dan fungsional kebijakan ini, mengakibatkan aspek lain seperti sosial dan budaya dari program tersebut masih kurang mendapatkan sorotan. Kebijakan pemerintah sebenarnya tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga membentuk pengalaman sosial yang berpengaruh pada cara masyarakat memahami dan menginterpretasikan kebijakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa studi tentang pandangan masyarakat terhadap program MBG menunjukkan bahwa, meskipun tingkat dukungan untuk program ini cukup tinggi, penilaian masyarakat mengenai manfaat program tidak selalu sepenuhnya positif atau konsisten. Orang tua yang masih memiliki pandangan netral terkait pengaruh program terhadap kesehatan anak (50,4%) dan pengurangan beban ekonomi keluarga (45,9%), serta belum mengamati dampak yang signifikan pada kondisi fisik anak (Minarsih et al., 2025). Hasil ini menunjukkan dan memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap kebijakan tidak selalu sejalan dengan persepsi manfaat yang dirasakan, sehingga sangat memungkinkan untuk membuka peluang analisis yang lebih mendalam mengenai cara masyarakat memahami dan memaknai kebijakan tersebut.

Perspektif penelitian lainnya juga memperlihatkan bagaimana program MBG bisa dipahami sebagai suatu elemen dari strategi yang lebih komprehensif dan kompleks dalam konteks keamanan manusia. Program ini berperan tidak hanya sebagai kebijakan dalam negeri, tetapi juga sebagai wujud komitmen negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, seperti makanan, kesehatan, dan kesejahteraan, yang menjadi fokus agenda global (Azzahra, 2024). Hal ini semakin memperjelas bagaimana kebijakan sosial seperti MBG dapat berfungsi sebagai alat yang memperkuat legitimasi negara, baik di dalam negeri maupun di arena internasional.

Untuk memahami secara holistik aspek tersebut, diperlukan cara pandang yang dapat melihat kebijakan bukan sekadar alat administratif yang kesannya kaku, akan tetapi juga sebagai praktik sosial yang menciptakan atau memproduksi makna, karena sebenarnya kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu proses yang tidak hanya mendistribusikan sumber daya, tetapi juga membentuk pandangan, kepercayaan, dan interaksi antara negara dengan masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dengan program MBG tidak hanya membawa dampak secara material, tetapi juga memengaruhi bagaimana masyarakat melihat posisi negara itu sendiri di dalam kehidupan mereka.

Jika dilihat dalam konteks program makan di sekolah, pendekatan ini memberikan kesempatan untuk memandang program MBG tidak hanya sebagai kebijakan sosial, tetapi juga sebagai praktik yang memengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kebijakan yang diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah memiliki peluang untuk membangun citra sebagai pelindung dan penyokong kesejahteraan bagi warganya, yang bisa menciptakan bentuk pengakuan sosial terhadap pemerintah.

Banyaknya penelitian yang meneliti topik ini menunjukkan bagaimana posisi MBG sebagai entitas yang kompleks untuk dipahami secara mendalam. Akan tetapi, meskipun sudah banyak penelitian yang telah mengupas tentang program makan di sekolah serta pelaksanaan dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan pendidikan, analisis yang secara khusus meneliti Program Makan Bergizi Gratis sebagai praktik sosial yang berfokus pada bagaimana perspektif sosial membentuk arti dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat masih cukup jarang dan mungkin tidak ada. Mayoritas penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek teknis

serta evaluasi kebijakan, sementara dimensi makna sosial yang muncul dari interaksi masyarakat dengan kebijakan tersebut belum banyak diteliti secara mendalam. Kekosongan dan *gap* tersebutlah, yang tulisan ini coba untuk jembatani dan lengkapi. Kekurangan dan *gap* tersebut coba diatasi dengan mengkaji bagaimana orang tua siswa memaknai Program Makan Bergizi Gratis sebagai inisiatif pemerintah, serta bagaimana makna tersebut berperan dalam pembentukan legitimasi pemerintah dalam kehidupan sosial masyarakat.

1.5.2 Landasan Teori

Dalam studi ilmu sosial, kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui dominasi kaku seperti dominasi ekonomi atau dominasi politik semata, melainkan juga melalui mekanisme simbolik yang menghasilkan pengakuan dalam masyarakat. Pandangan ini dijelaskan oleh Pierre Bourdieu dengan konsep modal simbolik. Bourdieu mengemukakan dan menggaris bawahi tentang bagaimana masyarakat sebenarnya tidak hanya terdiri dari hubungan material semata, tetapi juga hubungan simbolik yang membentuk cara individu memahami otoritas, legitimasi, dan kekuasaan dalam konteks sosial (Bourdieu, 1986).

Dalam konsep ini, Bourdieu mengelompokkan modal menjadi beberapa kategori utama, yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik. Modal ekonomi adalah sumber daya material yang bisa segera diubah menjadi uang, sementara modal sosial berkaitan dengan jaringan relasi yang dimiliki individu atau kelompok. Modal kultural berhubungan dengan pengetahuan, pendidikan, dan kompetensi budaya yang memberikan posisi tertentu dalam struktur sosial. Sementara itu, modal simbolik berbeda dari bentuk modal lainnya karena ini merujuk pada modal sebelumnya yang dapat terkonversi menjadi pengakuan, kehormatan, dan legitimasi yang diperoleh individu atau institusi dari masyarakat, dan modal-modal ini nantinya akan digunakan untuk bertahan di *field*, yakni konsep arena stratifikasi sosial (Bourdieu, 1986).

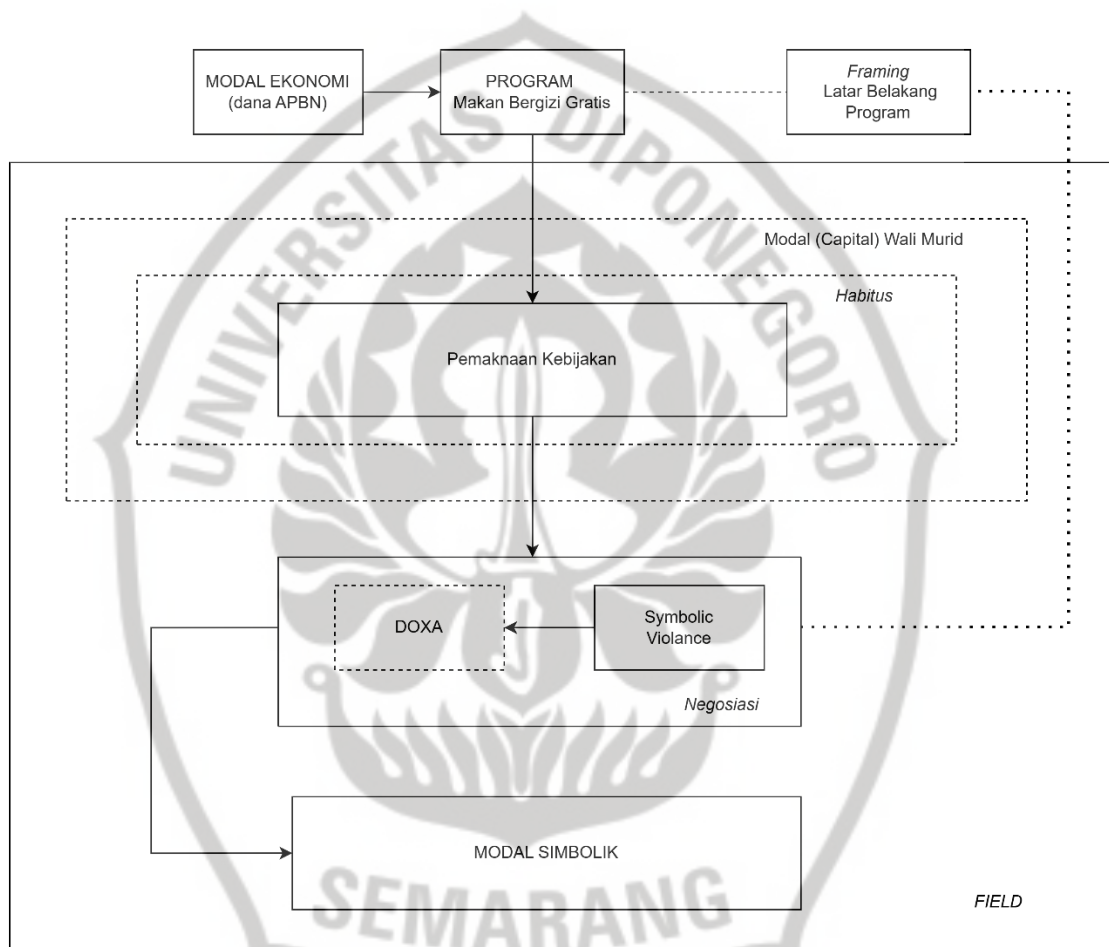
Modal simbolik sebenarnya merupakan produk konversi dari penerimaan sosial terhadap bentuk kekuasaan atau otoritas tertentu. Menurut pandangan Bourdieu, kekuasaan simbolik beroperasi dengan cara yang halus karena diterima masyarakat sebagai hal yang wajar. Hubungan kekuasaan tidak selalu muncul

sebagai dominasi yang dipaksakan, melainkan juga sesuatu yang dipandang sebagai sesuatu yang sah dan pantas oleh yang mengakuinya (Bourdieu, 1991). Dapat dikatakan modal simbolik muncul saat masyarakat memberi pengakuan kepada otoritas tertentu, sehingga otoritas itu mendapatkan legitimasi dalam konteks arena sosial.

Dalam sebuah negara dengan sistemnya sendiri saja, modal simbolik dapat tetap diproduksi melalui berbagai praktik institusional, termasuk kebijakan publik yang secara langsung memengaruhi dan bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan dengan konsep *Symbolic Violence* dari Pierre Bourdieu. Konsep yang menjelaskan bagaimana perspektif masyarakat dapat diarahkan dan diseuaikan oleh pemerintah tanpa menggunakan kekerasan fisik secara langsung, melainkan dengan cara yang lebih halus dan tentunya tanpa ada interaksi fisik secara langsung melalui berbagai cara, salah satunya adalah narasi dan kebijakan. Ini adalah cara pemerintah mempertahankan posisi dalam masyarakat. Kebijakan yang memberikan dampak positif bagi warga dapat membentuk pandangan tertentu tentang peran negara sebagai pelindung atau penyedia kesejahteraan bagi rakyat. Ketika masyarakat melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk perhatian atau kepedulian dari negara, kebijakan itu dapat menghasilkan legitimasi simbolik bagi negara. Proses ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai praktik simbolik yang membentuk interaksi antara negara dan masyarakat (Wacquant, 2013, Shore and Wright, 1997).

Berdasarkan sudut pandang tersebut, ide mengenai modal simbolik dapat dimanfaatkan untuk memahami cara masyarakat menafsirkan kebijakan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam studi ini, ide modal simbolik diterapkan untuk mengkaji bagaimana orang tua siswa menafsirkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk kehadiran dan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan anak-anak mereka. Penafsiran ini kemudian dilihat sebagai bagian dari proses produksi modal simbolik pemerintah, yaitu proses di mana kebijakan publik menciptakan pengakuan sosial yang memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat (Lubis, 2025).

Penelitian ini bermula dari anggapan bahwa kebijakan publik tidak hanya memberikan efek fisik bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan makna sosial yang muncul dari pengalaman masyarakat saat berinteraksi dengan kebijakan itu. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan pemerintah yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat memiliki potensi untuk membentuk pandangan tertentu tentang peran pemerintah dalam kehidupan sosial (Shore dan Wright, 1997).



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

Teori modal simbolik yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu sendiri, melihat dan memaknai kekuasaan tidak hanya bekerja melalui dominasi ekonomi atau politik, tetapi juga melalui mekanisme simbolik yang menghasilkan pengakuan sosial dari masyarakat. Ketika masyarakat memberikan pengakuan terhadap otoritas atau tindakan tertentu, pengakuan tersebut dapat berubah menjadi bentuk

legitimasi simbolik yang memperkuat posisi aktor yang diakui tersebut (Bourdieu, 1986, 1991). Program Makan Bergizi Gratis sendiri tentunya bisa dipahami dan dianggap sebagai praktik kebijakan pemerintah yang dapat memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat, terutama kepada para orang tua yang menjadi penerima manfaat program, yang manan nantinya pengalaman ini kemudian ditafsirkan oleh orang tua melalui berbagai pengertian sosial yang dipengaruhi oleh kehidupan sehari-hari, interaksi dengan lembaga pendidikan, serta cerita-cerita yang berkembang mengenai kebijakan pemerintah. Cara orang tua memahami program tersebut bisa menghasilkan variasi yang beragam, khususnya dan pastinya tentang pandangan terhadap negara, seperti keyakinan bahwa pemerintah peduli terhadap kesejahteraan anak-anak, atau bahwa negara terlibat dalam kehidupan masyarakat melalui kebijakan sosial itu sendiri. Ketika pemahaman ini menghasilkan pengakuan terhadap fungsi negara, maka proses tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari pembentukan modal simbolik negara (Wacquant, 2014).

Di sinilah bagaimana penelitian ini memposisikan diri untuk menganalisis bagaimana pemaknaan wali murid terhadap Program Makan Bergizi Gratis berkontribusi terhadap pembentukan modal simbolik negara dalam kehidupan sosial masyarakat. Kerangka berpikir ini yang membawa dan menganggap bahwa pengalaman masyarakat dan cara mereka mengartikan sesuatu sebagai alat analisis untuk mengetahui bagaimana kebijakan publik dapat memberikan legitimasi simbolik kepada negara.

1.6 Metode Penelitian

Menurut Burgin (2003) dalam Buku Metode Penelitian Kualitatif karya Nasution (2023) metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah tersebut artinya sebuah penelitian harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan: rasional, empiris, dan sistematis. Lebih lanjut, metode penelitian menjadi dasar sebuah penelitian yang penting karena data yang dikumpulkan selama penelitian adalah data empiris yang memenuhi syarat valid, reliabel, dan objektif. Validitas menunjukkan tingkat akurasi antara data yang benar-benar terjadi di lapangan tentang objek dan data yang dikumpulkan oleh peneliti (Nasution, 2023). Pengalaman langsung, interaksi langsung, dan beberapa

hal lainnya yang dilakukan selama melakukan penelitian ini menjadi data yang penting untuk mengumpulkan data data tersebut.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Etnografi dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam kehidupan sosial, makna, dan praktik budaya dari perspektif pelaku atau informan itu sendiri. Menurut James Spradley (2016) dalam *Participant Observation*, etnografi merupakan upaya sistematis untuk memahami cara pandang suatu kelompok terhadap dunia mereka sendiri melalui keterlibatan langsung peneliti dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan kata lain, etnografi tidak sekadar menggambarkan apa yang dilakukan orang, tetapi juga berusaha menafsirkan mengapa dan bagaimana tindakan tersebut bermakna bagi mereka.

Sebagaimana dijelaskan dalam *Ethnography: Principles in Practice*, pendekatan etnografi menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang mengamati dan berinteraksi langsung dengan konteks sosial yang diteliti, dengan tujuan memperoleh pemahaman holistik atas praktik sosial, simbol, dan relasi kekuasaan yang berlangsung di lapangan. Melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan pencatatan lapangan, etnografi memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa makna yang tidak dapat dijangkau melalui metode survei atau eksperimen.

Pendekatan ini relevan untuk penelitian mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Tembalang karena fenomena yang dikaji bukan hanya berkaitan dengan distribusi makanan atau efektivitas program, melainkan juga mengenai makna sosial yang muncul dari interaksi masyarakat dengan kebijakan negara. Dalam konteks ini, penelitian berupaya memahami bagaimana wali murid memaknai kehadiran program MBG dalam kehidupan sehari-hari mereka, apakah sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara atau sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan anak-anak mereka.

Sebagaimana dijelaskan oleh Clifford Geertz (1973) dalam *The Interpretation of Cultures*, tugas antropolog adalah melakukan *thick description* atau deskripsi tebal yang tidak hanya mencatat fakta empiris, tetapi juga menafsirkan lapisan makna budaya yang melandasi tindakan sosial. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk menelusuri bagaimana kebijakan negara seperti MBG dimaknai dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat sekolah di Tembalang, serta bagaimana makna sosial tersebut terbentuk melalui pengalaman dan interaksi masyarakat dengan program tersebut.

Penelitian etnografis ini menggunakan pendekatan naturalistik, sebagaimana dijelaskan oleh John W. Creswell (2013) dalam *Qualitative Inquiry and Research Design*, yaitu meneliti fenomena sosial di dalam konteks alamnya tanpa manipulasi dari peneliti. Data penelitian ini dikumpulkan melalui partisipasi dan observasi langsung di lapangan secara intensif. Dalam pelaksanaannya, peneliti tidak hanya mengandalkan teori, tetapi terjun langsung untuk mengamati jalannya program dari hulu ke hilir. Di tingkat produksi, peneliti melakukan observasi ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Sehat Tembalang untuk melihat secara langsung ritme kerja di dapur, seperti proses persiapan bahan dan persiapan distribusi. Di tingkat distribusi dan konsumsi, peneliti datang ke SD Negeri Tembalang saat jam sekolah berlangsung. Observasi difokuskan pada momen-momen penting, mulai dari kedatangan makanan di sekolah, proses koordinasi pengajar dan petugas dalam mendistribusikan omprang ke ruang-ruang kelas, hingga mengamati interaksi dan respons langsung siswa ketika mengonsumsi makanan tersebut. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan orang tua siswa, pengajar, dan pihak penyelenggara di sela-sela rutinitas tersebut. Melalui pengamatan harian yang menyeluruh inilah, peneliti berusaha untuk memahami pola pikir, nilai, serta pandangan yang secara nyata membentuk perspektif masyarakat mengenai program bantuan negara ini

Metode etnografi dalam penelitian ini diarahkan untuk menggali pengalaman dan pemaknaan masyarakat sekolah terhadap kebijakan MBG dalam konteks sosial yang lebih holistik dan terperinci, yaitu SD Negeri Tembalang. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana pengalaman menerima program tersebut berkontribusi terhadap terbentuknya persepsi tertentu mengenai peran negara dalam kehidupan masyarakat. Melalui perspektif ini, penelitian berupaya memahami bagaimana pemaknaan tersebut dapat menghasilkan bentuk pengakuan sosial yang pada akhirnya berpotensi membentuk modal simbolik negara, sebagaimana dijelaskan oleh Pierre Bourdieu.

1.6.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Tembalang yang berada di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Daerah Tembalang memiliki daya tarik sosial yang signifikan karena terletak di antara dua karakter lingkungan yang berbeda. Di satu sisi, terdapat area pendidikan dan perumahan yang cepat berkembang karena adanya Universitas Diponegoro, yang menunjukkan dinamika urban dan mobilitas sosial yang cukup tinggi. Di sisi lain, sebagian penduduk di daerah ini masih mempertahankan gaya hidup komunal yang merupakan ciri khas masyarakat Jawa. Keberagaman kondisi sosial ini menjadikan Tembalang sebagai lokasi yang relevan untuk mempelajari bagaimana kebijakan nasional diterima dan dipahami oleh masyarakat setempat.

Pemilihan SD Negeri Tembalang sebagai lokasi penelitian dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa sekolah ini merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar yang melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai institusi pendidikan negeri, sekolah ini menjadi salah satu titik implementasi kebijakan negara yang secara langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui pelaksanaan program MBG, sekolah menjadi ruang sosial tempat berbagai aktor bertemu, mulai dari kebijakan pemerintah, pelaksana program di tingkat sekolah, hingga siswa dan wali murid sebagai penerima manfaat.

Secara lokasi, SD Negeri Tembalang terletak di area semi-perkotaan dengan kemudahan akses transportasi dan lumayan dekat dengan berbagai sarana umum. Di sekitar sekolah, tampak permukiman penduduk dengan beragam latar belakang ekonomi sosial, termasuk keluarga pekerja lepas, pedagang kecil, dan pegawai dengan jenis pekerjaan yang tidak tetap. Variasi dalam keadaan sosial ekonomi ini menjadikan lingkungan sekolah sebagai konteks yang menarik untuk memahami persepsi masyarakat terhadap program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

Secara kultural, masyarakat di wilayah Tembalang masih menunjukkan kuatnya nilai kekeluargaan dan interaksi sosial yang relatif erat antarwarga (Prihanto, 2015). Hal ini juga tercermin dalam keterlibatan orang tua dalam aktivitas sekolah, termasuk dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan

pelaksanaan program MBG, di tambah kondisi ekonomi yang mayoritas dari menengah keatas, Kondisi tersebut memberikan ruang bagi peneliti untuk mengamati bagaimana interaksi dan pemaknaan antara masyarakat, sekolah, dan kebijakan negara berlangsung dalam praktik kehidupan sehari-hari tanpa ada intervensi dari variabel lainnya seperti faktor ekonomi dan berbagai faktor lainnya.

Penelitian ini dilakukan dalam periode tiga bulan, mulai dari Desember hingga Februari 2025. Proses penelitian ditempuh dalam beberapa langkah, dimulai dengan observasi awal untuk memahami konteks sosial di sekolah dan pelaksanaan program MBG, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan wali murid dan guru. Tahap terakhir dilakukan dengan melakukan refleksi analitis serta triangulasi data untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan pemaknaan masyarakat terhadap program tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hammersley dan Atkinson (2019), penelitian etnografi mengharuskan peneliti untuk terlibat secara mendalam dalam lingkungan sosial yang diteliti agar dapat mengerti praktik sosial dan makna yang muncul di dalamnya. Oleh karena itu, keterlibatan langsung peneliti dalam aktivitas sekolah dan interaksi dengan informan merupakan aspek krusial dalam usaha memahami bagaimana kebijakan pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis, dipahami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

1.6.3 Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam fenomena yang diteliti. Menurut James Spradley (2016) dalam *Participant Observation*, informan dalam penelitian etnografi bukan sekadar Informan, melainkan *cultural insiders*, yaitu individu yang memahami makna, nilai, dan praktik sosial dari dalam kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, pemilihan informan tidak didasarkan pada jumlah yang besar, tetapi pada kedalaman informasi yang dapat mereka berikan mengenai konteks sosial yang diteliti.

Selain menggunakan *purposive sampling*, penelitian ini juga memanfaatkan teknik *snowball sampling*, yaitu pengembangan informan berdasarkan rekomendasi

dari informan awal yang dianggap memahami konteks lapangan. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan H. Russell Bernard (2011) dalam *Research Methods in Anthropology*, yang menekankan bahwa dalam penelitian etnografi hubungan personal dan kepercayaan sosial merupakan faktor penting untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, informan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informan utama dengan total 7 (tujuh) informan dan informan tambahan dengan total 4 (empat) orang. Informan utama terdiri dari orang tua yang anaknya mengikuti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Tembalang yang setidaknya ekonominya stabil dan bisa memenuhi kebutuhan makanan pokok keluarga setiap harinya tanpa adanya kendala yang signifikan. Orang tua dipilih sebagai informan utama karena mereka adalah pihak yang secara langsung mengalami efek dari program dalam kehidupan sehari-hari keluarga dan memiliki pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan kebijakan tersebut dan pastinya seharusnya terdampak dari berbagai aspek dari kebijakan ini, mulai dari ekonomi, sosial, ataupun kultural.

Sementara itu, informan pendukung terdiri atas pihak sekolah dan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Guru dipilih karena mereka memiliki pengetahuan mengenai bagaimana kebijakan yang berasal dari pemerintah diterjemahkan dalam praktik sehari-hari di lingkungan sekolah, termasuk dalam hal pengaturan kegiatan makan bersama, distribusi makanan, serta komunikasi dengan orang tua siswa. Sedangkan informasi dari pegawai SPPG juga diperlukan untuk mengetahui lebih mendalam melalui sudut pandang yang lebih teknis bagaimana program dilaksanakan, diimplementasikan, dan diinterpretasikan dari sudut pandang implementasinya.

Jumlah informan dalam penelitian ini tidak ditentukan secara kaku sejak awal, melainkan bersifat fleksibel dan berkembang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Menurut Spradley (2016), penelitian etnografi mengikuti prinsip *saturation*, yaitu pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah mencapai titik kejenuhan dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini melibatkan sekitar 6–8 informan,

yang terdiri atas beberapa wali murid sebagai informan kunci serta guru atau pihak petugas SPPG sebagai informan pendukung.

Pemilihan informan dilakukan dengan memperhatikan variasi pengalaman sosial mereka terhadap program MBG. Wali murid dengan latar belakang pekerjaan dan kondisi ekonomi yang berbeda, serta guru dengan peran yang berbeda dalam kegiatan sekolah, misalnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena MBG dari berbagai sudut pandang yang saling melengkapi.

Untuk menjaga etika penelitian, seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, kerahasiaan identitas, serta hak mereka untuk menolak menjawab pertanyaan tertentu. Prinsip *informed consent* dijaga sesuai dengan pedoman etika penelitian yang dikeluarkan oleh *American Anthropological Association*. Dalam konteks etnografi, hubungan antara peneliti dan informan dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menghargai, sehingga proses pengumpulan data berlangsung secara etis dan reflektif.

Dengan demikian, penentuan informan dalam penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman dan pemaknaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informan diposisikan bukan sebagai objek penelitian, melainkan sebagai subjek yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai bagaimana kebijakan negara hadir dan dimaknai dalam kehidupan sehari-hari.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat dua cara dalam memperoleh data. Data dibagi menjadi dua kategori: primer dan sekunder. Data Primer, merupakan data utama yang dikumpulkan oleh subjek penelitian secara langsung atau dengan tangan pertama. Data primer adalah data yang objektif, otentik, reliabel dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi dengan para informan. Sedangkan data sekunder, merupakan data yang bukan didapatkan dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan. Dengan kata lain, data sekunder ini merupakan data penguat untuk data primer, yang diperoleh dari artikel, buku, atau karya ilmiah lainnya (Nasution, 2023). Metode pengumpulan data yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan dengan daftar pertanyaan kunci sebagai acuan. Biasanya, dalam wawancara mendalam ini menggunakan teknik wawancara semi-struktur yang dilakukan dengan cara yang lebih informal dan fleksibel, sesuai dengan norma lokal, dan kadang-kadang dengan canda tawa, tetapi tetap menggunakan pertanyaan kunci sebagai acuannya agar tetap sesuai dengan topik pembahasan yang telah dibuat. Melalui wawancara mendalam, informan akan menjelaskan pendapatnya, menceritakan pengalamannya melalui pengamatannya pribadi. Dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan daftar pertanyaan kunci sebagai acuan, yang selanjutnya ada pertanyaan pendukung setelah informan menceritakan hal yang menarik untuk mendapatkan data lebih lanjut (Nurdiani, 2014).

Dalam proses pelaksanaannya di lapangan, peneliti memang menyiapkan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan kunci mengenai pengalaman dan pemaknaan informan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun saat berhadapan langsung dengan para wali murid, guru, maupun petugas SPPG, proses tanya jawab dibiarkan mengalir layaknya obrolan sehari-hari yang wajar, sering kali diselingi canda tawa dan disesuaikan dengan norma lokal agar informan merasa nyaman dan terbuka. Wawancara dilakukan di berbagai latar tempat yang tidak kaku, seperti di sela-sela waktu orang tua menjemput anak di sekolah, saat jam istirahat, maupun di ruang-ruang diskusi informal lainnya. Melalui pendekatan semi-terstruktur ini, peneliti tidak hanya terpaku pada draf pertanyaan. Ketika informan menceritakan keluhan, pengalaman unik, atau pandangan yang menarik mengenai operasional MBG, peneliti dapat secara spontan mengajukan pertanyaan pendukung untuk mengeksplorasi jawaban tersebut lebih jauh, sehingga data empiris yang diperoleh menjadi lebih kaya, holistik, dan mendalam.

b) Observasi Partisipan

Menurut Nasution (2023), observasi partisipan memposisikan peneliti sebagai partisipan dalam suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat yang ingin diteliti. Partisipan ini memiliki makna sebagai pengamat yang belajar melalui pengalaman secara langsung. Sebagai partisipan, peneliti berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan informan untuk mencari tahu informasi terkait topik penelitian. Metode observasi partisipan ini menekankan adanya proses interaksi yang intens antara peneliti dan subjek penelitian. Peneliti membaur dengan masyarakat setempat, dengan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri, mengikuti kegiatan sehari-hari para informan dan berupaya untuk membangun pendekatan dan menjaga hubungan yang baik dengan informan. Dalam penelitian ini, observasi partisipan dilakukan dengan mengikuti dan melihat secara langsung beberapa rangkaian kegiatan, serta mendengarkan langsung dan berdiskusi langsung dengan para informan yang terdampak program Makan Begizi Gratis (MBG) secara langsung.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dalam penelitian etnografi untuk menunjang validitas data melalui data visual yang dapat secara langsung dilihat oleh para pembaca. Dokumentasi ini digunakan untuk menangkap setiap momen kehidupan para informan di lokasi penelitian. Berbagai foto yang dihasilkan dari penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait dinamika kehidupan informan pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi difokuskan untuk menangkap rangkaian aktivitas dalam pelaksanaan MBG, agar mempermudah pembaca untuk menggambarkan.

1.6.5 Analisis Data

Setelah mendapatkan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipan dan dokumentasi, selanjutnya data tersebut akan dianalisis menggunakan model dari Miles dan Huberman (1994) yang mengemukakan bahwa pengolahan data kualitatif dapat dilakukan dalam tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan tindakan yang dapat dilakukan terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan jumlah yang cukup banyak, dan bentuk yang tidak sengaja dengan data kuantitatif. Oleh karena itu, dapat dilakukan reduksi data, yang berarti menggabungkan data, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola dan item, dan membuang data yang tidak diperlukan.

b) Penyajian data

Setelah data penelitian direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data lebih jelas. Hasil wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti dianalisis, dan dihubungkan dengan Teori Modal Simbolik dan menjabarkannya melalui deskripsi secara detail. Dalam mendeskripsikan data, diperlukan konstruksi data sesuai dengan kategori yang disajikan ke dalam beberapa subbab.

c) Menarik Kesimpulan

Setelah melakukan penyajian data, langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan. Hasil analisa yang telah dijabarkan pada tahap penyajian data akan ditarik kesimpulannya yang dapat dipahami oleh penulis maupun pembaca secara singkat sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, saya membaginya menjadi beberapa BAB di bawah ini:

BAB I akan berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan konteks sosial dan politik dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka serta landasan teori, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai fondasi konseptual dan metodologis yang mengarahkan keseluruhan penelitian.

BAB II menjelaskan mengenai kondisi geografis dan sosial SD Negeri Tembalang, Kabupaten Semarang, serta karakteristik masyarakat dan aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Bab ini juga menguraikan konteks sosial dan institusional yang melingkupi implementasi program di tingkat lokal, termasuk hubungan antara sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat penerima manfaat..

BAB III memuat secara deskriptif dan analitis bagaimana pelaksanaan program MBG di SD Negeri Tembalang berlangsung dalam keseharian. Pada bagian ini dijelaskan pula bagaimana program tersebut dimaknai oleh para penerima manfaat (siswa, wali murid, dan tenaga pendidik), serta bagaimana praktik distribusi dan simbolisme “pemberian” dalam program ini membentuk hubungan sosial antara negara dan masyarakat.

BAB IV menguraikan bagaimana program MBG tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme politik yang membuahi pemaknaan simbolik antara masyarakat dengan masyarakat penerima manfaat.

BAB V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi penulis berdasarkan isi dan hasil dari penelitian.